

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Windi Tyas Oktavia¹, Siti Aliyah^{2*}

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara^{1,2}

^{2*)}staliyah10@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to empirically examine the factors that influence the implementation of regional financial reporting transparency in Jepara district. This study uses a population of OPD Jepara Regency with purposive sampling method, totaling 78 respondents who are heads of divisions and finance staff. Data analysis used multiple regression analysis. The results showed that external pressure, management commitment, accountability, level of financial statement disclosure, government internal control system, political factors, human resource competence did not affect the implementation of regional financial reporting transparency, while environmental uncertainty affected the implementation of regional financial reporting transparency.

Keywords: *External pressure, environmental uncertainty, management commitment, accountability, level of financial statement disclosure, government internal control system, political factors, HR competence, financial reporting transparency.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris faktor yang mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah di kabupaten Jepara. Penelitian ini menggunakan populasi OPD Kabupaten Jepara dengan metode purposive sampling, yang berjumlah responden 78 yang merupakan kepala bagian dan staf keuangan. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan eksternal, komitmen manajemen, akuntabilitas, tingkat pengungkapan laporan keuangan, sistem pengendalian intern pemerintah, faktor politik, kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah sedangkan ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah.

Kata kunci: *Tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen, akuntabilitas, tingkat pengungkapan laporan keuangan, sistem pengendalian intern pemerintah, faktor politik, kompetensi SDM, transparansi pelaporan keuangan.*

1. PENDAHULUAN

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang jujur dan terbuka pada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (KK, SAP,2005) dalam (Fardian, 2014). Upaya reformasi penyajian pelaporan keuangan daerah nampaknya belum dapat dilaksanakan

sepenuhnya oleh pemerintah daerah maupun di jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintahan Daerah. Di sisi lain, publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lain nampaknya belum menjadi hal yang umum bagi sebagian daerah (Siti Aliyah, 2012). Tidak adanya transparansi publik akan menimbulkan dampak negatif yang luas dan dapat merugikan masyarakat. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparan, pemerintah diharapkan dapat beradaptasi terhadap tekanan eksternal. Tekanan eksternal dalam hal ini terkait dengan tekanan yang berasal dari luar OPD seperti regulasi, masyarakat, eksekutif, peraturan-peraturan yang di buat oleh pemerintah dan sebagainya.

Hal lain yang dapat mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan yaitu ketidakpastian lingkungan. Dengan definisi sebagai faktor-faktor lingkungan yang dihadapi organisasi dan berpotensi mengganggu kinerja organisasi bila organisasi tidak bisa beradaptasi dengan baik terhadap laju perubahan maupun dinamikanya, yang terdiri dari faktor-faktor tingkat perubahan regulasi, tingkat perubahan teknologi informasi, tingkat perubahan pasar dan persaingan.

Komitmen manajemen sebagai suatu keadaan karyawan dalam mengidentifikasi keterlibatannya memihak organisasi tertentu. Dengan demikian komitmen akan menimbulkan rasa turut memiliki suatu pekerjaan terhadap organisasi. Sehingga karyawan berusaha mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Rendahnya komitmen mencerminkan kurangnya tanggung jawab seseorang dalam menjalankan tugasnya. Faktor selanjutnya adalah akuntabilitas. Wujud dari akuntabilitas adalah pengelolaan APBD dalam pelayanan masyarakat dengan dibuatnya laporan pertanggungjawaban. Selanjutnya yang dapat mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan adalah tingkat pengungkapan laporan keuangan.

Menurut PP No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Masalah politik dalam birokrasi negara salah satunya administrasi negara terjadi pada tugas utama birokrasi-birokrasi negara. Dalam menjalankan kebijakan, birokrasi-birokrasi negara tidaklah steril dari lingkungan politik suatu negara. Berjalan atau tidaknya implementasi kebijakan negara oleh birokrasi-birokrasi negara sangat dipengaruhi lingkungan politik suatu negara. Faktor yang selanjutnya yakni kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya fikir dan fisik yang dimiliki individu. Sumber daya manusia merupakan asset dari segala aspek pengelolaan terutama yang menyangkut eksistensi organisasi.

Adapun penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Basuki (2012) menunjukkan faktor tekanan eksternal dan komitmen memiliki pengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Penelitian yang dilakukan Azhar (2014) menunjukkan bahwa akuntabilitas, kepemimpinan dan komitmen berpengaruh sedangkan ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Penelitian Yunaz (2016) menunjukkan tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan dan cakupan laporan keuangan berpengaruh sedangkan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan. Noprizal (2017) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen, sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan. Sedangkan penelitian

yang dilakukan Fardian (2014) penelitian ini memberikan bukti bahwa pelaksanaan transparansi pelaporan keuangan di pemerintahan kota dipengaruhi oleh faktor politik, ketidakpastian lingkungan dan kompetensi sumber daya manusia.

Oleh karena masih terdapatnya perbedaan pada penelitian sebelumnya, maka dalam peneliti melakukan pengujian penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah yang dipengaruhi tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen, akuntabilitas, tingkat pengungkapan laporan keuangan, sistem pengendalian intern pemerintah, faktor politik, kompetensi sumber daya manusia.

2. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Landasan Teori

Transparansi

Transparansi memiliki arti keterbukaan (*openness*), yaitu keterbukaan oleh pemerintah dalam menyampaikan informasi yang terkait dengan kegiatan manajemen sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah memiliki kewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk melakukan pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik tersebut diperlukan informasi akuntansi yang salah satunya berupa laporan keuangan.

Tekanan Eksternal

Tekanan eksternal merupakan tekanan yang sumbernya dari pihak luar organisasi. Tekanan dari luar organisasi seperti peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Adanya peraturan tersebut ditunjukkan untuk mengatur praktik yang ada supaya menjadi lebih baik (Basuki, 2012). Tetapi, dalam praktiknya peraturan-peraturan daerah masih sulit di terapkan oleh pemerintah daerah terutama OPD dsebagai pelaksana.

Ketidakpastian Lingkungan

Ketidakpastian dapat disebabkan berbagai hal dari luar organisasi, misalnya perubahan peraturan yang cepat dalam satu rentang waktu tertentu, adanya peraturan yang berbeda antara satu dengan yang lain, terjadinya mutasi staf OPD yang cepat, tingkat perubahan teknologi informasi, tingkat perubahan pasar dan persaingan, tingkat perubahan regulasi dan sebagainya. OPD dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, baik dalam praktik maupun operasionalnya. Praktik yang dimaksud dalam penelitian ini dikhususkan pada penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Komitmen Manajemen

Komitmen sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan dan keinginan untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Komitmen organisasi sebagai rasa identifikasi (kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi), keterlibatan (kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi) dan loyalitas (keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi yang bersangkutan) yang dinyatakan oleh seorang pegawai terhadap organisasinya (Kuntjoro, 2002) dalam (Noprizal, 2017).

Akuntabilitas

Akuntabilitas publik pemerintah daerah adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah daerah harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk di beri informasi (*right to be informed*), dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*).

Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan

Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan dilakukan untuk melindungi hak-hak publik yang cenderung terabaikan. Tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh penilaian manajer. Tingkat pengungkapan yang semakin mendekati pengungkapan penuh akan mengurangi asimetri informasi yang merupakan kondisi yang dibutuhkan untuk dilakukannya manajemen laba. Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan, Suwardjono (2005) dalam (Yunaz, 2016). Tujuan pengungkapan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang memadai bagi para pengguna laporan keuangan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Faktor Politik

Masalah politik dalam birokrasi negara (juga administrasi negara) terjadi pada tugas utama birokrasi-birokrasi negara. Tugas pengadministrasian tersebut sebelumnya telah digariskan lewat Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang telah disusun baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat maupun secara bersama. Dalam proses menjalankan suatu kebijakan negara oleh birokrasi-birokrasi negara tidaklah steril dari lingkungan politik suatu negara. Berjalan atau stagnannya implementasi kebijakan negara oleh birokrasi-birokrasi negara sangat dipengaruhi lingkungan perpolitikan suatu negara. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berpengaruh dari lingkup internal, eksternal, resmi, atau non resmi.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang digunakan untuk menggerakkan dan menyinegrikan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Tanpa sumber daya manusia (SDM), sumber daya lainnya menganggur dan kurang bermanfaat dalam mencapai tujuan organisasi (Wirawan, 2012).

Pengembangan Hipotesis

Tekanan Eksternal Berpengaruh Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah

Tekanan eksternal merupakan tekanan dari luar OPD salah satunya adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan adanya peraturan dari pemerintah untuk mempublikasikan hasil laporan keuangan daerah maka semakin tinggi juga penerapan transparansi pelaporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Noprizal (2017) tekanan eksternal yang terbentuk dari luar seperti adanya peraturan pemerintah, tekanan masyarakat ataupun dorongan dari pihak tertentu memperlancar proses transparansi untuk dilakukan dalam bentuk penyajian laporan keuangan. Begitu juga penelitian yang dilakukan Yunaz (2016) dan Basuki (2012) faktor tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah. Sehingga hipotesis dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Tekanan eksternal berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah.

Ketidakpastian Lingkungan Berpengaruh Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah

Ketidakpastian lingkungan dalam hal ini disebabkan berbagai hal dari luar organisasi, misalnya perubahan peraturan yang cepat dalam satu rentang waktu tertentu, terjadinya mutasi staff OPD yang cepat, tingkat perubahan teknologi informasi dan sebagainya. Salah satu penyebab ketidakpastian lingkungan adalah perubahan peraturan yang cepat dalam rentang waktu tertentu, sehingga OPD dituntut untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada baik dalam praktik transparansi pelaporan keuangan maupun operasionalnya. Maka ketidakpastian lingkungan yang tinggi mendorong percepatan terjadinya proses transparansi pelaporan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan Yunaz (2016) organisasi yang sukses akan selalu beradaptasi dengan perubahan-perubahan lingkungannya dan secara proaktif merubah lingkungannya. Begitu juga penelitian dari Noprizal (2017), Fardian (2014) ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah. Sehingga hipotesis dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut :

H2 : Ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah.

Komitmen Manajemen Berpengaruh Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah

Komitmen sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan dan keinginan untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi (Noprizal, 2017). Semakin tinggi komitmen individu terhadap organisasi maka semakin tinggi pula tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Hal ini berarti semakin tinggi komitmen manajemen aparat pemda maka semakin tinggi penerapan transparansi pelaporan keuangan. Penelitian terdahulu dari Noprizal (2017), Al Azhar (2014) menunjukkan bahwa penerapan transparansi pelaporan keuangan di pengaruhi oleh komitmen manajemen. Komitmen manajemen berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga hipotesis dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut :

H3 : Komitmen Manajemen berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah.

Akuntabilitas Berpengaruh Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah

Dalam melakukan evaluasi terhadap organisasi dibutuhkan akuntabilitas. Evaluasi kinerja dilakukan untuk menilai sejauh mana pencapaian hasil-hasil serta bagaimana cara-cara untuk mencapainya. Dengan adanya akuntabilitas, pemerintah daerah harus memberikan informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Ketika proses tersebut berhasil maka proses transparansi pelaporan keuangan mengalami peningkatan. Penelitian Al Azhar (2014) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Lembaga Administrasi Negara (LAN, 2001) menyebutkan bahwa salah satu bentuk akuntabilitas adalah akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga hipotesis dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut :

H4 : Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah.

Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Berpengaruh Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah

Secara konseptual, pengungkapan adalah bagian integral dari pelaporan keuangan (Suwardjono 2005) dalam (Yunaz, 2016). Tujuan pengungkapan adalah menyediakan informasi yang memadai bagi para pengguna laporan keuangan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya tingkat pengungkapan laporan keuangan, maka hak-hak publik yang cenderung terabaikan salah satunya adalah hak untuk di beri informasi terpenuhi. Sehingga semakin tinggi tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah maka semakin tinggi juga penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah. Penelitian dari Yunaz (2016) menunjukkan hasil tingkat pengungkapan laporan keuangan berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Tingkat pengungkapan laporan keuangan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga hipotesis dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut :

H5 : Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Berpengaruh Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jika pengendalian intern terimplementasikan dengan tepat serta peraturan perundang-undangan dijalankan maka pelaporan keuangan yang dihasilkan andal (Noprizal, 2017). Terwujudnya transparansi laporan keuangan daerah akan menjadi landasan awal bagi tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan segala pertanggungjawaban keuangan yang berasal dari dana masyarakat akan berjalan lancar seiring kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dalam bidang pengelolaan

keuangan negara. Sehingga semakin tinggi sistem pengendalian intern pemerintah maka semakin tinggi juga penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah. Penelitian Noprizal (2017) menunjukkan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga hipotesis dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut :

H6 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah.

Faktor Politik Berpengaruh Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah

Dalam struktur pemerintahan, faktor politik berperan dalam menekan organisasi untuk menerapkan transparansi dengan cara memberikan tekanan kepada pejabat terkait dan menerapkan kebijakan yang berguna dalam penerapannya. Dengan demikian penerapan transparansi dalam hal laporan keuangan dapat menggambarkan bentuk dari sebuah organisasi, dan menyesuaikan diri dengan kebutuhannya serta mendapatkan legitimasi. Penelitian yang dilakukan Fardian (2014) menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh dari faktor politik terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah. Sehingga hipotesis dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut :

H7 : Faktor politik berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah.

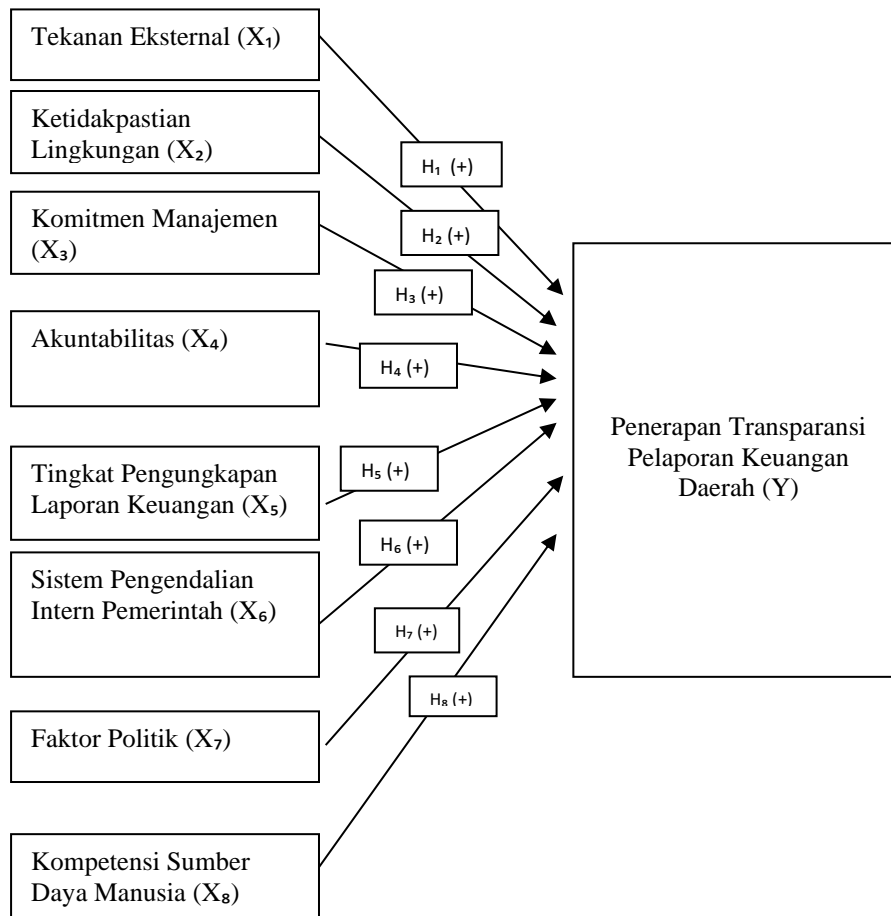
Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah

Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Sumber daya manusia merupakan asset dalam segala aspek pengelolaan terutama yang menyangkut eksistensi organisasi (Fardian, 2014). Apabila sumber daya manusia dalam suatu OPD berkompetensi dengan baik maka semakin baik pula tanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya, sehingga penerapan transparansi pelaporan keuangan akan semakin baik. Penelitian yang dilakukan Fardian (2014) Kompetensi Sumber Daya Manusia mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga hipotesis dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut :

H8 : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah

3. MODEL PENELITIAN

Berikut ini disajikan gambar model penelitian



Gambar 1. Model Penelitian

4. METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan sumber data diperoleh langsung dari sumber pertamanya menggunakan kuesioner yang disebar langsung ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jepara. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jepara. Teknik Pengambilan Sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria yang diambil adalah 1 kepala bagian dan 1 staf keuangan di masing-masing OPD. Sehingga sampel dalam penelitian ini adalah seluruh anggota populasi yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 18 Dinas, 3 Badan, dan 15 Kecamatan di Kabupaten Jepara yang mempunyai kewenangan di bagian keuangan. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jepara diambil masing-masing 2 (dua) responden yaitu kepala bagian keuangan/ akuntansi karena kepala keuangan adalah sebagai pengambil keputusan dan staff bagian keuangan/ akuntansi sebagai teknisnya sehingga jumlah sampelnya 78.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Model regresi dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + b_5x_5 + b_6x_6 + b_7x_7 + b_8x_8 + e$$

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut informasi terkait dengan penyebaran kuesioner dalam penelitian ini :

Tabel 1 : Rincian Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang disebar	78
Kuesioner yang kembali	78
Kuesioner yang dapat digunakan untuk diolah	78
Tingkat pengembalian kuesioner (78/78x100%)	100%
Total kuesioner yang diolah	78

Sumber : data primer yang diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kuesioner yang dikirim atau disebar sebanyak 78 dan kuesioner yang kembali jumlahnya sebanyak 78. Tingkat pengembalian kuesioner sebesar 100%. Sehingga jumlah kuesioner yang dapat digunakan dan diolah sebanyak 78 kuesioner.

Analisis Data

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, maka hasil pengujian validitas dapat ditunjukkan pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2 : Uji Validitas

Variabel	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
Transparansi	0,474	0,1876	Valid
Tekanan	0,604	0,1876	Valid
Ketidakpastian	0,444	0,1876	Valid
Komitmen	0,595	0,1876	Valid
Akuntabilitas	0,733	0,1876	Valid
Pengungkapan	0,762	0,1876	Valid
SPIP	0,589	0,1876	Valid
Politik	0,660	0,1876	Valid
Kompetensi	0,379	0,1876	Valid

Sumber : data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa nilai r_{hitung} seuruh variabel diatas r_{tabel}, maka indikator untuk pernyataan seluruh variabel dikatakan valid.

Uji Reliabilitas

Hasil pengujian reliabilitas dalam penelitian ini tersaji pada tabel 3 di bawah ini :

Tabel 3 : Hasil Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0,847	0,855	9

Sumber : data primer yang diolah

Hasil tersebut menunjukkan bahwa dalam penelitian ini mempunyai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,847 diatas 0,60 maka reliabel, sehingga variabel dalam penelitian ini layak digunakan sebagai alat ukur.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4 : Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		78
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1,73533607
Most Extreme Differences	Absolute	0,084
	Positive	0,058
	Negative	-0,084
Kolmogorov-Smirnov Z		0,739
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,646

Sumber: data primer yang diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa besarnya nilai *test statistic kolmogorov-smirnov* adalah 0,084 dan nilai signifikansi 0,646 > 0,05. Hal ini berarti H₀ diterima yang berarti data residual terdistribusi normal. Dengan demikian model regresi layak digunakan untuk penelitian.

Uji Multikolinieritas

Adapun hasil uji mutikolinieritas dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini :

Tabel 5 : Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Tekanan	0,527	1,899
	Ketidakpastian	0,747	1,339
	Komitmen	0,593	1,687
	Akuntabilitas	0,434	2,302
	Pengungkapan	0,397	2,520
	SPIP	0,483	2,068
	Politik	0,486	2,059
	Kompetensi	0,654	1,528

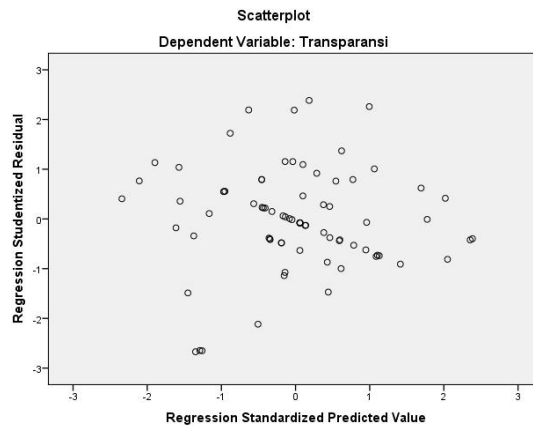
a. Dependent Variable: Transparansi

Sumber : data primer yang diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil perhitungan nilai *tolerance* > 0,10. Hasil perhitungan dari nilai VIF juga menunjukkan variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai VIF < 10. Sehingga tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil dari uji heteroskedastisitas dengan menggunakan analisis grafik plot ditunjukkan pada gambar berikut :



Sumber : data primer yang diolah

Gambar 2. Grafik Scatterplot Uji Heteroskedastisitas

Dari grafik *scatterplots* diatas terlihat bahwa titik-titik pada diagram scatter plot menyebar secara acak, tidak beraturan dan membentuk pola serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga layak dipakai untuk memprediksi variabel dependen berdasarkan masukan variabel independen.

Analisis Regresi Berganda

Hasil perhitungan dari analisis regresi berganda disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 6 : Hasil Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	5,313	3,346		1,588	0,117
Tekanan	-0,003	0,074	-0,007	-0,047	0,963
Ketidakpastian	0,272	0,133	0,240	2,037	0,045
Komitmen	0,083	0,147	0,075	0,567	0,572
Akuntabilitas	-0,042	0,108	-0,060	-0,385	0,701
Pengungkapan	0,157	0,091	0,279	1,725	0,089
SPIP	0,057	0,178	0,047	0,317	0,752
Politik	0,033	0,114	0,042	0,289	0,774
Kompetensi	0,117	0,132	0,112	0,890	0,376

a. Dependent Variable: Transparansi

Sumber : data primer yang diolah

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = 5,313 - 0,003x_1 + 0,272x_2 + 0,083x_3 - 0,042x_4 + 0,157x_5 + 0,057x_6 + 0,033x_7 + 0,117x_8 + e$$

Uji Hipotesis

Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh masing-masing variabel tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen,

akuntabilitas, tingkat pengungkapan laporan keuangan, sistem pengendalian intern pemerintah, faktor politik dan kompetensi sumber daya manusia terhadap variabel penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah. Hasil *output* SPSS perhitungan *t* hitung ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 7 : Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
	B	Std. Error	Coefficients Beta		
1 (Constant)	5,313	3,346		1,588	0,117
Tekanan	-0,003	0,074	-0,007	-0,047	0,963
Ketidakpastian	0,272	0,133	0,240	2,037	0,045
Komitmen	0,083	0,147	0,075	0,567	0,572
Akuntabilitas	-0,042	0,108	-0,060	-0,385	0,701
Pengungkapan	0,157	0,091	0,279	1,725	0,089
SPIP	0,057	0,178	0,047	0,317	0,752
Politik	0,033	0,114	0,042	0,289	0,774
Kompetensi	0,117	0,132	0,112	0,890	0,376

a. Dependent Variable: Transparansi

Sumber : data primer yang diolah

Koefisien Determinasi (R²)

Hasil dari analisis koefisien determinasi dapat dilihat pada *output* SPSS tabel *summary* berikut ini :

Tabel 8 : Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,532 ^a	0,283	0,200	1,833

a. Predictors: (Constant), Kompetensi, Tekanan, Ketidakpastian, Komitmen, Politik, SPIP, Akuntabilitas, Pengungkapan

Sumber : data primer yang diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai dari *Adjusted R Square* sebesar 0,200 dalam hal ini berarti bahwa variabel independen yang terdiri dari tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen, akuntabilitas, tingkat pengungkapan laporan keuangan, sistem pengendalian intern pemerintah, faktor politik dan kompetensi sumber daya manusia dapat menjelaskan variabel dependen penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah dengan nilai sebesar 20% sedangkan sisanya 80% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Tekanan Eksternal Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah.

Penelitian ini menjelaskan bahwa tidak ada pengaruh tekanan eksternal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah, hal ini dapat dilihat dari jawaban-jawaban responden atas pernyataan tentang tekanan eksternal diantaranya pada pernyataan seringnya pemberitaan media massa akan transparansi pelaporan keuangan berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan di OPD menunjukkan bahwa dari seluruh responden terdapat jawaban tidak setuju sebesar 16,67%, jawaban

netral sebesar 20,51%, dan pada pernyataan tuntutan pengusaha atau komunitas bisnis atas penerapan transparansi pelaporan keuangan berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan di OPD menunjukkan bahwa dari seluruh responden terdapat jawaban sangat tidak setuju sebesar 5,13%, jawaban tidak setuju sebesar 12,82% dan jawaban netral sebesar 20,51%.

Dari jawaban responden menunjukkan bahwa tekanan eksternal di beberapa instansi pemerintah Kabupaten Jepara masih rendah, terutama pada seringnya pemberitaan media massa akan transparansi pelaporan keuangan berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan di OPD dan tuntutan pengusaha atau komunitas bisnis atas penerapan transparansi pelaporan keuangan berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan di OPD. Sehingga jika seringnya pemberitaan media massa akan transparansi masih rendah, maka penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah juga rendah. Ada atau tidaknya tekanan eksternal yang berupa peraturan-peraturan pemerintah (regulasi) tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah. Apabila suatu organisasi atau instansi tidak menginginkan laporan keuangan tersebut di publikasi, maka organisasi atau instansi tersebut tidak akan mempublikasi laporan keuangan tersebut. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Dewi (2015) dan Benny (2016) yang menyatakan bahwa Tekanan Eksternal tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah.

Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah.

Ketidakpastian lingkungan dalam hal ini disebabkan berbagai hal dari luar organisasi yang berpotensi mengganggu kinerja organisasi bila organisasi tidak mampu beradaptasi dengan baik terhadap laju perubahan maupun dinamikanya, salah satunya perubahan peraturan yang cepat dalam satu rentang waktu tertentu. Dengan adanya perubahan peraturan yang cepat dalam rentang waktu tertentu, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada baik dalam praktik transparansi pelaporan keuangan maupun operasionalnya. Praktik yang dimaksud dalam penelitian ini di khususkan pada penerapan transparansi pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Yunaz (2016), Noprizal (2017) dan Fardian (2017) yang menyatakan bahwa Ketidakpastian Lingkungan berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah.

Pengaruh Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah.

Penelitian ini menjelaskan bahwa tidak ada pengaruh komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah di Kabupaten Jepara, hal ini dapat dilihat dari jawaban responden atas pernyataan tentang komitmen manajemen yang menunjukkan bahwa komitmen manajemen di beberapa instansi masih rendah, dilihat dari pernyataan kuesioner pada point keinginan membangun budaya etis dalam menerapkan transparansi pelaporan keuangan di OPD menunjukkan bahwa dari seluruh responden terdapat jawaban netral sebesar 12,82% dan kebutuhan OPD akan partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa dari seluruh responden terdapat jawaban netral sebesar 17,94% . Dari hasil jawaban responden diatas menunjukkan bahwa komitmen manajemen di beberapa organisasi/ instansi pemerintah Kabupaten Jepara masih rendah.

Sehingga menunjukkan komitmen manajemen di beberapa organisasi/ instansi belum berjalan dengan baik dalam menjalankan aktivitas organisasinya. Terutama pada keinginan membangun budaya etis dalam menerapkan transparansi pelaporan keuangan dan kebutuhan OPD akan partisipasi masyarakat. Jika kebutuhan OPD akan partisipasi masyarakat meningkat maka penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah juga meningkat. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Benny (2016) dan Yunaz (2016) yang menyatakan komitmen manajemen tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah.

Penelitian ini menjelaskan bahwa tidak ada pengaruh akuntabilitas terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah, hal ini dapat dilihat dari jawaban responden atas pernyataan-pernyataan kuesioner tentang akuntabilitas. Dari jawaban responden menunjukkan bahwa akuntabilitas di beberapa instansi pemerintah masih rendah, dilihat dari jawaban responden pada pernyataan kuesioner point pertanggungjawaban atas kebijakan-kebijakan yang diambil terhadap masyarakat luas, dari seluruh responden terdapat jawaban sangat tidak setuju sebesar 2,56%, jawaban tidak setuju 3,85% dan jawaban netral 11,54% dan pernyataan pertanggungjawaban atas kebijakan-kebijakan yang diambil terhadap DPRD setempat menunjukkan bahwa dari seluruh responden terdapat jawaban tidak setuju sebesar 2,56% dan netral sebesar 17,95%. Apabila pertanggungjawaban atas kebijakan-kebijakan yang diambil terhadap masyarakat luas masih rendah maka penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah juga rendah. Namun berdasarkan dengan fenomena yang ada, akuntabilitas yang diyakini memberikan kontribusi dalam usaha mereduksi praktek korupsi yang terjadi di pemerintah daerah melalui transparansi pelaporan keuangan masih sedikit. Pemerintah daerah juga belum sepenuhnya menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to informed*), dan hak untuk di dengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*).

Pengaruh Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah.

Penelitian ini menjelaskan bahwa tidak ada pengaruh tingkat pengungkapan laporan keuangan pada penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden atas pernyataan-pernyataan kuesioner tentang tingkat pengungkapan laporan keuangan. Dari jawaban responden menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan di beberapa instansi masih rendah, dilihat dari pernyataan pada kuesioner point laporan keuangan OPD menyediakan informasi yang memprediksi masa yang akan datang berdasarkan masa lalu dan kejadian masa kini menunjukkan bahwa dari seluruh responden terdapat jawaban netral sebesar 29,49% dan laporan keuangan OPD menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktivitas keuangan masa depan menunjukkan bahwa dari seluruh jawaban responden terdapat jawaban netral sebesar 16,67%. Sehingga jika laporan keuangan OPD tidak menyediakan informasi yang memprediksi masa yang akan datang berdasarkan masa lalu dan kejadian masa kini, maka pengguna laporan keuangan tersebut ragu-ragu, sehingga tingkat pengungkapan laporan keuangan masih rendah. Dari jawaban seluruh responden tertinggi di beberapa instansi hanya mampu menyusun laporan keuangan

secara lengkap (laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan).

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah.

Penelitian ini menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah, hal ini dapat dilihat dari beberapa jawaban responden atas pernyataan tentang sistem pengendalian intern pemerintah pada point metode penelitian/pengukuran resiko dan sistem informasi manajemen mempengaruhi usaha OPD dalam memperbaiki transparansi pelaporan keuangan dari seluruh responden terdapat jawaban netral sebesar 12,82% dan pernyataan pada point adanya otoritas yang sesuai dan memadai aktivitas dari seluruh responden terdapat jawaban netral sebesar 14,10%. Dari hasil jawaban responden diatas menunjukkan bahwa beberapa responden masih ada yang bingung mengenai sistem pengendalian intern pemerintah di instansinya masing-masing, sehingga menunjukkan penggunaan sistem pengendalian pada beberapa instansi pemerintah di Kabupaten Jepara belum berjalan dengan baik dalam menjalankan aktivitas organisasi, sehingga masih sering terjadi penyimpangan, tindakan penyelewengan, dan dampak lain yang menyebabkan melemahnya organisasi. Oleh karena itu kegiatan evaluasi atas kinerja dan pengambilan tindakan-tindakan atas kecurangan tersebut masih sulit dilakukan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Ayem (2017) yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah.

Pengaruh Faktor Politik Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah.

Penelitian ini menjelaskan bahwa faktor politik tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden atas pernyataan-pernyataan kuesioner tentang faktor politik. Dari jawaban responden menunjukkan bahwa faktor politik di beberapa instansi pemerintah Kabupaten Jepara masih relatif rendah, karena dari jawaban responden pada point tekanan dari anggota eksekutif terhadap penerapan transparansi laporan keuangan dari seluruh responden terdapat jawaban sangat tidak setuju sebesar 1,28%, tidak setuju sebesar 15,38% dan netral sebesar 29,49% dan ketergantungan pemerintah daerah pada pusat dari seluruh responden terdapat jawaban sangat tidak setuju sebesar 1,28%, tidak setuju sebesar 15,38% dan netral sebesar 28,20%. Dari jawaban responden di atas menunjukkan bahwa faktor politik di beberapa instansi pemerintah Kabupaten Jepara masih rendah. Terutama pada tekanan dari anggota eksekutif terhadap penerapan transparansi laporan keuangan, apabila tekanan dari anggota eksekutif tinggi untuk menerapkan transparansi atau mempublikasikan pelaporan keuangan, maka penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah juga akan naik. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Dewi (2015) yang menyatakan bahwa faktor politik tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah.

Penelitian ini menjelaskan bahwa tidak ada pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah. Hal ini dapat

dilihat dari jawaban responden atas pernyataan-pernyataan kuesioner tentang kompetensi sumber daya manusia. Dari jawaban responden menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia di beberapa instansi pemerintah Kabupaten Jepara masih rendah pada pernyataan kuesioner point memiliki pemahaman tentang transparansi pelaporan keuangan dari seluruh responden terdapat jawaban tidak setuju sebesar 1,28%, netral sebesar 2,56% dan point mengetahui prosedur pencatatan laporan keuangan dari seluruh responden terdapat jawaban tidak setuju sebesar 1,28 dan netral sebesar 3,85%. Dari jawaban responden menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia di beberapa instansi pemerintah Kabupaten Jepara masih rendah, terutama pada pemahaman tentang transparansi pelaporan keuangan dan mengetahui prosedur pencatatan laporan keuangan. Sehingga jika sumber daya manusia di instansi tersebut memahami tentang transparansi pelaporan keuangan dan berkompetensi dengan baik sesuai keahliannya maka penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah semakin meningkat. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Benny (2016) dan Yulianto (2018) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah.

6. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini yakni tekanan eksternal tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jepara, komitmen manajemen tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah pada OPD di Kabupaten Jepara, akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah pada OPD di Kabupaten Jepara. Berdasarkan fenomena yang ada pemerintah daerah belum sepenuhnya menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, tingkat pengungkapan laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah pada OPD di Kabupaten Jepara, sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah pada OPD di Kabupaten Jepara, faktor politik tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah pada OPD di Kabupaten Jepara, dan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah pada OPD di Kabupaten Jepara.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Azhar, W. A. (2014). Pengaruh Akuntabilitas, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Pimpinan Terhadap Penerapann Keuangan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada DKPD Kota Dumai). *JOM FEKON Vol. 1 No. 2 Oktober* .
- Ayem, S. (2017). Pengaruh Aspek-aspek Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Kajian Bisnis* , 161-175.
- Basuki, M. A. (2012). Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Managemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *Simposium Nasional Akuntansi* , 1-28.

- Benny, P. M. (2016). Pengaruh Tekanan Eksternal, Pengendalian Internal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Manajemen Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. 1-28.
- Davici, N. (t.thn.). Pengaruh Tekanan Eksternal, Komitmen Pimpinan dan Faktor Politik Terhadap Transparansi Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Oranisasi Perangkat Daerah Kabupaten Agam). 1-20.
- Dewi. (2015). Pengaruh Tekanan Eksternal, Faktor Politik, Dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Karangasem). *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha* .
- Fardian, D. (2014). Pengaruh Faktor Politik, Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi* , 1-18.
- Forum Dosen, A. S. (2006). *Standar Akuntansi Pemerintahan Telaah Kritis PP No. 24 TAHUN 2005*. Yogyakarta: BPFE YOGYAKARTA.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro ISBN 979.704.015.1.
- Indria, N. A. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 1-131.
- Krisherdian, R. A. (2015). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Jember. 1-109.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI Yogyakarta.
- Munandar, S. A. (2001). Psikologi Industri dan Organisasi. *Universitas Indonesia (UI-Press)* .
- Noprizal, R. (2017). Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Managemen dan Sistem Pengendalian Pemerintah Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *JOM Fekon, Vol.4 No. 1* , 1066-1080.
- Phaithun Intakhan, P. U. (2009). Earning Management In Thailand: Effects On Financial Reporting Reliability, Stakeholder Acceptance and Corporate Transparency. *Journal Of International Finance and Economics, Volume 9, Number 3* , 1-24.
- Putra, B. M. (2016). Pengaruh Tekanan Eksternal, Pengendalian Internal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Manajemen Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal). 1-28.
- Rela Driteny, S. M. (t.thn.). Gambaran Umum Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. *Forum Manajemen* .
- Siti Aliyah, A. N. (2012). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas

- Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi & Auditing* , 97-189.
- Suardana, K. A. (2018). Pengaruh Tekanan Eksternal, Pengendalian Internal, Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen Organisasi Pada Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* , 747-774.
- Sugiyono, P. D. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, CV.
- Syahril, A. R. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transparansi Pelaporan Keuangan Desa Di Kecamatan Kalianget Timur Kabupaten Sumenep. *Jurnal Akuntansi Publik* , 1-16.
- Wirawan. (2012). *evaluasi kinerja sumber daya manusia teori dan aplikasi dan penelitian* . Yogyakarta: Salemba.
- Yuliani, N. L. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Aksebilitas Dan Pengendalian Intern Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)* , 1-14.
- Yulianto, A. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua .
- Yunaz, A. R. (2016). Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Organisasi dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kampar). *JOM Fekon, Vol. 3, No. 1* , 1594-1607.